

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Sikap Nasionalisme

1.1. Konsep Sikap

a. Pengertian Sikap

Sikap atau dalam pengertian Bahasa Inggris *attitude* menurut Purwanto (1994: 141) adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang atau kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Secara sederhana, sikap dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu.

Pengertian sikap pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:34) adalah “suatu perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan): perilaku; gerak-gerik”

Pengertian di atas menunjukkan bahwa rangsangan atau stimulus sangat menentukan untuk bangkitnya suatu motif. Dengan demikian sikap mengarah pada objek tertentu, yang berarti penyesuaian diri terhadap objek dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap objek.

Pengertian sikap lainnya ditemukan lebih dari tiga puluh definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan sekian banyak definisi dapat kami kemukakan

beberapa pendapat tentang sikap, diantaranya adalah sebagai berikut.

Sementara itu, menurut A. Ahmadi (1991: 163) mengatakan bahwa “sikap adalah sebagai tindakan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, ide dan sebagainya.”

Hal senada juga diungkapkan S.W. Sarwono (1999: 232) bahwa “sikap merupakan sesuatu yang dipelajari (bukan bawaan). Oleh karena itu, sikap lebih dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi dan diubah”. Sikap tidak bisa dilihat, tapi dapat disimpulkan dari tanda-tanda yang dapat diamati.

Melihat berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh faktor kognisi dan afeksi individu terhadap objek tersebut. Dengan demikian, sikap belum merupakan suatu tindakan aktifitas, akan tetapi kecenderungan untuk bertingkah laku. Sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu. Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensi untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila dihadapkan suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.

b. Komponen Pembentukan Sikap

Sebelum satu sikap diambil setidaknya terdapat tahapan-tahapan atau komponen yang harus dipenuhi yaitu dengan pelibatan-pelibatan komponen kognitif, afektif, dan behavior. Mengenai pelibatan komponen Travers, Gagne dan Cronbach (Ahmadi, 1991: 165) menjelaskan sebagai berikut:

1) Komponen kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.

2) Komponen afektif menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap yaitu yang berhubungan dengan objek dimana objek itu dapat bersifat yang menyenangkan atau tidak menyenangkan.

3) Komponen behaviour melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak lebih lanjut. Hal senada juga diungkapkan oleh Allport yang dikutip oleh Mar'at (1981: 85) yang menyatakan bahwa terdapat 3 komponen dalam sikap yaitu:

“komponen kognisi yang berhubungan dengan belief (kepercayaan atau keyakinan), ide, konsep, persepsi, stereotipe, opini yang dimiliki individu mengenai sesuatu, komponen afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang menyangkut perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi, komponen kognisi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.”

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sikap selalu terkandung tiga unsur sikap yaitu unsur kognitif yang akan menjawab pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang suatu objek, unsur afeksi yang menjadi pertanyaan tentang apa yang dirasakan (perasaan senang atau tidak senang), dan unsur konasi yang akan menjawab kesediaan atau persiapan untuk bertindak terhadap suatu objek.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap

1) Pembentukan sikap

Sikap dalam diri seseorang tidak akan terbentuk dengan sendirinya tetapi melalui suatu proses interaksi. Hal ini sesuai dengan ungkapan W. Sarwono (1999: 252) yang mengemukakan, bahwa “pembentukan sikap tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses tertentu yaitu melalui kontak sosial terus menerus antara

individu dengan individu-individu lain di sekitarnya.”

Selain terbentuk oleh pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang dialami individu, sikap juga dapat dibentuk melalui prasangka yakni semacam pendapat negatif perihal sesuatu tanpa memperhatikan kenyataan, lebih lanjut Sarwono (1999: 267) mengungkapkan bahwa:

“Prasangka adalah penilaian terhadap sesuatu hal berdasarkan fakta dan informasi yang tidak lengkap, jadi sebelum orang mengetahui benar mengenai sesuatu hal, ia sudah menetapkan pendapatnya mengenai hal tersebut dan atas dasar itu ia membentuk sikapnya”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap yang dimiliki individu terbentuk seiring dengan perkembangan individu sendiri, faktor pengalaman dan prasangka. Namun demikian, faktor pengaruh dari luar individu menjadi penentu bagi pembentukan sikap seseorang sekalipun diakui bahwa faktor dalam individu pun seperti perhatian, norma, sikap yang sudah ada menjadi penentu terhadap terbentuknya sikap seseorang. Dengan kata lain, sikap terbentuk karena adanya pengaruh terhadap diri seseorang, baik pengaruh yang datang dari individu maupun pengaruh dari luar melalui pergaulan sehari-hari secara terus-menerus.

Adapun perumusan sikap menurut Gerungan (2004: 163) yang menyatakan bahwa:

- a. Attitude bukan dibawa orang sejak dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan objek.
- b. Attitude itu dapat berubah-ubah bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu.
- c. Attitude itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek.

- d. Objek attitude itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi juga dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- e. Attitude memiliki segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan yang berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan.

Adapun faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam pembentukan sikap adalah sebagai berikut:

- a) Faktor intern yaitu bagaimana individu menanggapi dunia luarnya secara selektif, dalam arti apa yang datang dari luar tidak semuanya diterima tetapi individu menghadapi pilihan terhadap rangsangan tersebut. Pilihan terhadap pengaruh dari luar biasanya disesuaikan dengan motif terutama yang menjadi minat perhatiannya.
- b) Faktor ekstern, yaitu keadaan di luar individu yang merupakan rangsangan untuk membentuk dan mengubah sikap. Pengenalan secara berulang-ulang terhadap objek yang sama dapat membentuk sikap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap tidak terlepas dari interaksi individu dan lingkungannya. Sikap tersebut sebagai hasil respon individu terhadap berbagai tuntutan yang dapat memberikan kepuasan terhadap dirinya. Sikap timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya sikap banyak dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, golongan, agama dan adat istiadat dan masyarakat.

Keluargalah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap anak. Keluarga sebagai komponen primer bagi anak yang memberikan pengaruh dominan. Selanjutnya, guru sebagai orang tua kedua bagi anak tidak kalah pentingnya dalam membentuk sikap dan perilaku anak.

Sesungguhnya sikap seseorang tidak selamanya tetap, ia dapat berkembang manakala terpengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif dan

mengesankan. Antara perbuatan dan sikap ada hubungan timbal balik, tetapi sikap tidak selalu menjelma dalam bentuk perbuatan maupun tingkah laku, namun bisa masih dalam bentuk sikap batin.

2) Perubahan Sikap

Menurut Kelley yang dikutip oleh Sadli (1988:12). “Mengemukakan bahwa proses perubahan sikap melalui tahap atensi, pemahaman dan penerimaan Teori yang dikemukakannya adalah teori stimulus respon dan penguatan yang menyatakan bahwa proses perubahan sikap menunjukkan persamaan dengan proses belajar dan prinsip memiliki keterampilan verbal dan motorik juga dapat diterapkan dalam mengartikan pembentukan dan perubahan sikap”.

Adapun tahap-tahap yang dikemukakan oleh Kelley adalah:

- a) Perhatian. Stimulus yang diberikan organism dapat diterima atau ditolak. Jika ditolak proses selanjutnya terhenti. Sebaliknya apabila stimulus diterima berarti stimulus tersebut efektif dalam mempengaruhi organisme.
- b) Pengertian. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian, maka proses selanjutnya adalah mengartikan stimulus tersebut. Kemampuan dalam tahap inilah yang dapat melanjutkan proses berikutnya.
- c) Penerimaan. Pada tahap ini individu menerima secara baik apa yang telah diolah sehingga adanya kesediaan untuk merubah sikap.

Selanjutnya Abu Ahmadi (1991: 171) mengemukakan tentang pengaruh atau rangsangan yang dapat merubah sikap yaitu:

Setiap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya, ekonomi, politik, agama dan sebagainya, di dalam perubahan sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-norma atau group. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan sikap antar individu, karena pengaruh lingkungan yang diterimanya.

Uraian di atas menegaskan bahwa lingkungan dapat mengubah sikap seseorang dan mempengaruhi sikap seseorang. Pengaruh lingkungan dapat berupa masyarakat dan pendidikan beserta perangkatnya yang sekaligus sebagai penanaman nilai. Penulis menyajikan teori-teori yang melandasi perubahan sikap seseorang diantaranya:

(a) Teori S-O-R di Reinforcement

Teori ini menitikberatkan pada penyebab sikap yang dapat mengubahnya dan tergantung pada kualitas rangsangan yang berkomunikasi dengan organisme. Teori ini menganggap perubahan sikap yang terjadi pada diri seseorang bergantung pada kualitas stimulus. Apabila respon ini sesuai dengan stimulus yang direncanakan, berarti perubahan sikap yang terjadi itu sesuai dengan yang diharapkan.

(b) Teori Konsistensi

Teori konsistensi ini telah banyak dikembangkan oleh para ahli seperti Ferlinger yang dikutip oleh Mar'at (1981: 85) menyatakan bahwa:

Keadaan *cognitif dissonance* merupakan keadaan ketidakseimbangan psikologi yang diliputi oleh ketegangan dari yang berusaha untuk mencapai keseimbangan. Ketidakseimbangan ini disebabkan karena pada seseorang terdapat dua elemen kognisi yang saling tidak sesuai. Elemen kognisi adalah pengetahuan, pendapat dan keyakinan. Jika pada diri seseorang terdapat ketidakseimbangan pada elemen kognisi, maka individu berada dalam ketegangan sehingga terjadi ketidakseimbangan.

Berpijak dari paparan di atas, teori ini menggambarkan sesuatu perubahan sikap akan terjadi apabila adanya dissonance yaitu keadaan-keadaan konflik yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan (konflik) disebabkan karena ketidaksesuaian pada unsur-unsur kognitifnya. Proses ketidakseimbangan akibatnya konflik itu pada akhirnya akan disesuaikan. Ada dua kemungkinan untuk

penyelesaian itu dan keduanya akan menuju pada keseimbangan. Yang pertama apabila rangsangan tidak berpengaruh atau berpengaruh sedikit pada potensi kognitifnya yang sudah ada maka proses keseimbangan akan diakhiri dengan penyatuan pendapat dan keyakinan semula. Artinya rangsangan yang diterima tidak atau kurang berpengaruh pada pendapat atau keyakinan. Yang kedua, apabila rangsangan yang diterimanya itu sudah ada (pengetahuan, pendapat, dan keyakinan) akan berubah fungsi dengan rangsangan yang diterimanya itu.

(c) Teori Fungsi

Menurut teori ini sikap memiliki fungsi instrumental dapat menyesuaikan dan dapat berfungsi pula dalam memberikan pelayanan. Manusia membentuk sikap positif terhadap objek untuk pemenuhan kebutuhan, dan jika objek tidak dapat memenuhi individu, maka terbentuklah sikap negatif. Rasionalnya sikap dapat pula membentuk hubungan sosial.

Teori fungsi di atas menggambarkan bahwa perubahan sikap sangat tergantung pada individu atau kebutuhan individu terhadap objek. Sikapnya akan positif apabila individu itu merasa butuh terhadap objek itu, atau objek itu akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan, maka sikapnya akan negatif. Banyak teori-teori lain yang mencoba menelusuri tentang perubahan sikap, akan tetapi dalam pembahasan ini penulis tidak bermaksud membahas seluruhnya tetapi hanya mengambil beberapa teori saja sebagai bahasan pengantar dari beberapa teori tentang perubahan sikap.

1.2. Konsep Nasionalisme

a. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata “nation”. Nation berasal dari kata “nation” yang berasal dari bahasa latin yang berarti bangsa atau negara, ditambah akhiran isme

berarti:

1. Suatu sikap ingin mendirikan negara bagi bangsanya dengan faham atau ideologinya.
2. Suatu sikap ingin membela tanah air dan negara dari penguasaan dan penjajahan bangsa asing.

Secara umum nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial.

Nasionalisme merupakan awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan penindasan bangsa asing. Tidak peduli dari suku mana, agama mana, ras mana, dan golongan mana, semua rakyat Indonesia pada waktu itu bersatu dalam semangat kebangsaan membela tanah airnya dari rongrongan bangsa asing.

Melihat kenyataan di atas, sudah jelas nasionalisme memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan bangsa dan negara Indonesia sejak zaman pergerakan nasionalisme sampai dengan masa kemerdekaan saat ini. Seperti yang dikemukakan dalam Ernest Renan (F. Isjawa, 1991: 126-127), yang dikutip oleh Deleny Yumarlia (2005:36), yang mengatakan bahwa: "Nasionalisme merupakan rasa kesadaran yang kuat berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah dan atas kemauan menderita hal-hal itu dimasa depan".

Dari pernyataan di atas, jelaslah bahwa Ernest Renan menyadari betapa pentingnya nilai sejarah dalam perkembangan faham nasionalisme, yang menekankan kepada perasaan senasib, persamaan pengalaman yang dapat membentuk suatu negara yaitu, nasionalisme adalah merupakan rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan

atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah dan atas kemauan menderita hal-hal serupa itu dimasa depan. Semangat kebangsaan yang memang telah berhasil menyatukan semua elemen bangsa bersatu melawan para penjajah yang menguasai Indonesia ratusan tahun lamanya.

Bangsa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dan beranekaragam baik itu kebudayaannya maupun masyarakatnya. Keanekaragaman itu tentu saja merupakan suatu pedoman dan faham yang cocok dengan karakter kemajemukan itu sendiri. Paham yang dirasakan cocok dengan kemajemukan ini adalah konsep kebangsaan yaitu nasionalisme. Semangat kebangsaan ini mutlak diperlukan untuk mengatasi kebhinekaan agar menjadi ketunggal ikaan.

Nasionalisme juga merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi dari setiap warga suatu bangsa ditunjukkan kepada bangsa dan negara. Lebih lengkapnya Hans Khon memberikan arti nasionalisme sebagaimana yang diterjemahkan oleh Sumantri Mertadipuro dalam Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya (1984: 11) menerangkan sebagai berikut:

Nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada disepanjang sejarah dan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda.

Hal senada dengan pendapat di atas Soekarno (1965:3), mengemukakan bahwa “nasionalisme adalah suatu tekad, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa”. Dengan demikian nasionalisme atau rasa nasionalis membentuk rasa percaya diri dan merupakan esensi mutlak jika kita mempertahankan diri dalam perjuangan melawan kondisi-kondisi yang

menyakitkan. Dikatakan juga bahwa nasionalisme menunjukkan adanya keyakinan dan kesadaran rakyat bahwa mereka merupakan satu golongan dan satu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme berawal dari kesamaan sejarah, dimana di dalamnya terdapat rakyat yang memiliki tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa yang utuh, tanpa mebedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan memiliki sebuah ikatan yang amat kuat dan tidak mudah lepas apabila ada pihak lain yang ingin melepaskan ikatan itu. Syarat yang sudah berlaku di masa sekarang bahwasannya setiap bangsa harus membentuk suatu Negara, dan bahwa Negara itu harus meliputi seluruh bangsa. Mulanya kesetiaan atau paham kebangsaan orang tidak ditujukan kepada Negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai macam bentuk kekuasaan organisasi politik, kekuasaan sosial, raja atau golongan keagamaan, tetapi lama kelamaan paham nasionalisme berkembang menjadi diakui oleh umum.

Hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto (1979:53), tentang nasionalisme dengan mengutip dari George Mc. T. Kahin mengatakan sebagai berikut:

“Nasionalisme adalah suatu ide yang mengisi hati manusia dengan suatu pikiran baru dan mendorong untuk menterjemahkan dalam tindakan berupa aksi yang diorganisasi. Karena itu nasionalisme bukan semata-mata suatu kelompok yang diikat dan dijiwai oleh kesadaran bersama, melainkan juga merupakan suatu kelompok yang ingin mengungkapkan dirinya kedalam apa yang dianggapnya bentuk tertinggi dari pada kegiatan yang terorganisasi yakni negara yang berdaulat”. Nugroho Notosusanto memberikan tekanan bahwa nasionalisme merupakan spirit, semangat, moril, yang hidup pada diri manusia demi keagungan bangsa.

Dengan demikian nasionalisme adalah merupakan perasaan cinta dan bangga,

kecintaan alamiah terhadap tanah air, mengakui adanya dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, perasaan membela tanah air apabila dalam keadaan terancam, selalu berhubungan baik dan toleransi terhadap orang lain, memiliki rasa perduli, tepa salira, setia kawan, dan cinta damai, peka dan perduli terhadap lingkungan, perduli terhadap masalah-masalah sosial, masalah kenegaraan baik nasional maupun internasional.

b. Sejarah Singkat Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

Menurut A. Ubaedillah (2008: 30-31), dalam sejarahnya nasionalisme Indonesia itu melalui beberapa tahap perkembangan yaitu diantaranya tahap yang ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib dan diikuti dengan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baik sebelum maupun sesudah proklamasi, tahap revolusioner dalam mempertahankan perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia, tahap persatuan dan kesatuan dengan menekankan pada penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi, serta perkembangan nasionalisme kosmopolitan yakni sebagai bangsa yang tidak dapat menghindari dari bangsa lain dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional.

Nasionalisme di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat ketika secara resmi Budi Utomo diakui oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1908. Secara singkat perkembangan nasionalisme Indonesia menjadi lebih ramai sejak berdiri Budi Utomo hingga Proklamasi Kemerdekaan. Sejak budi utomo berdiri organisasi-organisasi yang mengusahakan perbaikan kondisi rakyat.

Tahapan perkembangan nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Periode Awal Perkembangan

Dalam periode ini gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini

adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam dan Muhamadiyah.

b) Periode Nasionalisme Politik

Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Partij dan Gerakan Pemuda.

c) Periode Radikal

Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non kooperatif (tidak mau bekerjasama dengan penjajah). Organisasi yang bergerak secara non kooperatif, seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI.

d) Periode Bertahan

Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, Gerindo. (<http://rinahistory.blog.com/proses-kelahiran-dan-perkembangan-nasionalisme-di-indonesia>).

Dari perkembangan nasionalisme tersebut akhirnya mampu menggalang semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dari berbagai suku di Indonesia. Nasionalisme Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari cengkaman penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia ini sudah dimulai sejak zaman kerajaan di nusantara. Penjajahan di Indonesia sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 telah menyebabkan

penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan memang telah diciptakan dengan sengaja oleh bangsa belanda yang menjajah bangsa Indonesia kurang lebih selama 350 tahun di tanah air.

Pemerintah kolonial belanda telah mengeruk kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia mulai dari kekayaan alam sampai sumber daya manusia hanya untuk kepentingan kemajuan dan kemakmuran Negara sendiri. Politik etika yang mereka janjikan pada bangsa Indonesia berupa perbaikan dibidang pendidikan, pengairan, pemindahan penduduk tidaklah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penderitaan rakyat akibat perlakuan belanda seperti itu ditambah dengan kebangkitan nasionalisme di Asia setelah Perang Dunia ke-I mendorong dan membakar semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan perlawanan. Aksi perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 masih bersifat kedaerahan sehingga perlawanan gagal, satu per satu perlawanan bangsa Indonesia dapat ditaklukan penjajah Belanda.

Pada abad ke-20 perlawanan bersenjata yang masih bersifat kedaerahan berubah dan beralih ke perjuangan di berbagai bidang seperti bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini timbul karena para tokoh dan pemimpin pergerakan menyadari bahwa perjuangan bersenjata saja, apalagi perjuangan nasional yang tidak terpadu tidak akan membuahkan hasil yang baik.

Mereka sadar pula bahwa untuk perjuangan selanjutnya perlu adanya sebuah koordinasi persatuan dan kesatuan bangsa. Tahap ini dikenal sebagai kebangkitan nasional.

Berdirinya Boedi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi gerakan nasionalis yang diorganisasikan secara modern dan dipelopori oleh golongan intelektual muda. Selain itu pergerakan lainnya seperti Indische Partij, Serikat Dagang Islam, Gerakan

Emansipasi Wanita yang dipelopori oleh R. A. Kartini muncul dalam tahap perjuangan ini. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirah sumpah pemuda yang merupakan manifestasi satu tekad yang bulat dan keinginan bangsa Indonesia menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuj persatuan dan kesatuan bangsa yang akhirnya menjurus ke kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Setelah lahirnya sumpah pemuda, bermunculanlah pergerakan-pergerakan kebangsaan dengan dukungan, dorongan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang tiada hentinya, bahu-membahu untuk melepaskan diri dari penjajah. Akhirnya, atas berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di depan rakyat Indonesia.

Hal tersebut membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat membebaskan diri dari belenggu penjajahan belanda. Bangsa Indonesia mencapai titik puncak perjuangan kemerdekaan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

Perjuangan bersenjata dan perjuangan dalam bidang politik serta diplomasi itu melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa dan semangat nilai-nilai nasionalisme sebelumnya. Diantaranya yaitu rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, patriotisme, jiwa kepahlawanan, percaya kepada diri sendiri dan kemampuan sendiri, percaya kepada hari depan yang gemilang, idealisme kejuangan yang tinggi, rasa kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, rasa kekeluargaan dan gotong royong, semangat pantang menyerah dan pantang mundur serta nilai-nilai kejuangan lainnya.

Setelah kemerdekaan, tujuan kebangsaan dan nasionalisme tidak lagi hanya untuk melepaskan diri dari tangan penjajah, melainkan juga bagaimana membangun bangsa ini lebih maju dan sejahtera di dalam kemerdekaannya. Dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, nasionalisme menjadi dasar keinginan membangun kehidupan antar bangsa yang adil, damai, makmur dan sejahtera.

Namun beberapa tahun terakhir ini nasionalisme mengalami erosi atau kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh faktor pengaruh budaya asing yang datang dari luar. Pergaulan dunia yang semakin mengglobal menjadikan bangsa ini mudah dan rentan menerima segala produk budaya baru yang masuk ke Indonesia.

Masalah seperti ini sangat mengkhawatirkan beberapa tokoh masyarakat dan cendekiawan yang prihatin melihat generasi muda yang sangat minim dengan pemahaman kebangsaan, dimana Ginanjar Kartasasmita (Sukrama dkk, 1996: 238), mengungkapkan bahwa:

“Pertama, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi terutama dikalangan generasi muda seringkali disebut bahwa sifat materialistik telah menggantikan idealisme yang sukmanya kebangsaan. Kedua, ada kekhawatiran terjadi ancaman disintegrasi bangsa dimana paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan/primordialisme. Ketiga, ada keprihatinan adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini”.

Melihat kekhawatiran seperti diungkapkan di atas, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasi kemerosotan nilai-nilai nasionalisme ini, salah satunya dengan pendidikan formal melalui Pendidikan Kewarganegaraan dimana guru yang memiliki banyak peran dan tugas harus bisa membawa perubahan terhadap generasi muda dalam hal ini adalah siswa untuk memiliki pandangan positif serta luas

terhadap nilai-nilai itu ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan warga negara yang lain.

c. Karakteristik Nasionalisme Indonesia

Sudah dijelaskan sejak awal, bahwa lahirnya semangat nasionalisme atau kebangsaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, karena itulah karakteristik nasionalisme sendiri dapat dirumuskan dengan melihat sejarahnya. Karakteristik nasionalisme yang dimaksud disini adalah karakteristik nasionalisme Indonesia.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1992:245) mengemukakan unsur-unsur nasionalisme di Indonesia dibagi dalam tiga kategori:

- a. Unsur kognitif menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi/fenomena tertentu dalam hal ini mengenai pengetahuan akan situasi kolonial pada segala perposinya.
- b. Unsur orientasi nilai/tujuan menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelaku-pelakunya, dalam hal ini dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme
- c. Unsur afektif dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelaku-pelakunya.

Berbagai macam diskriminasi pada masyarakat colonial melahirkan aspek afektif.

Melihat pendapat di atas, maka ketiga aspek tersebut di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena saling berhubungan antara aspek satu dengan aspek lainnya yang akan saling menunjang dalam satu kesatuan. Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur: Pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik dan agama. Kedua, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk

penjajahan dan penindasan di Indonesia.

Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin dalam proklamasi kemerdekaan dengan jelas dinyatakan “atas nama bangsa Indonesia”, sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan secara tegas, “segala bentuk penjajahan dan penindasan didunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dilihat dari sejarahnya, menurut Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bahwa karakteristik nasionalisme Indonesia antara lain:

- a) Persamaan asal keturunan bangsa (etnik), yaitu bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa melayu yang merupakan bagian dari ras mongoloid dan kemudian diperkaya oleh variasi percampuran darah antar ras.
- b) Persamaan pola kebudayaan, terutama cara hidup sebagian suku-suku petani dan pelaut dengan segala adat istiadat dan lembaga sosialnya, manifestasi (perwujudan) persamaan bahasa nasional, yaitu bahasa indonesia.
- c) Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan nama khas tanah air, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa berwilayah dari sabang sampai merauke.
- d) Persamaan senasib kesejahteraan, baik kejayaan bersama dimasa kejayaan kerajaan-kerajaan besar jaman bahari sriwijaya dan majapahit, maupun penderitaan bersama dibawah dominasi penjajah asing.
- e) Persamaan cita-cita yakni persamaan cita-cita hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta membangun negara dalam ikatan persatuan indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. (Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1995)

Sedangkan karakteristik Nasionalisme Indonesia pada masa sekarang sebagaimana

tercantum dalam Pancasila sila ke tiga, yaitu Persatuan Indonesia dalam Pendidikan Kewarganegaraan SMA dengan berlandaskan pada sila ketiga pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki ciri atau karakteristik nasionalisme yang terdiri dari butir pancasila, sila ketiga yakni sebagai berikut:

- a) Menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
- b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
- c) Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia
- d) Mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia
- e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
- g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa nasionalisme itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga karena nasionalisme ini mewujudkan perwujudan dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Serta bahwasannya paham kebangsaan atau nasionalisme pada dasarnya mempunyai pokok-pokok yaitu kesetiaan terhadap negara dalam segala aspeknya, perasaan senasib dan sepenanggungan, sebagai identitas negara, merupakan suatu paham, dan pengakuan adanya negara nasional.

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa ciri atau indikator-indikator sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah sebagai berikut:

- a) Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia
- b) Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa

Indonesia

- c) Bersedia mempertahankan dan memajukan negara serta nama baik bangsa
- d) Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan
- e) Menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerja sama saling menguntungkan
- f) Memiliki rasa cinta tanah air Indonesia
- g) Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompok

2. Konsep Persepsi Siswa

2.1. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam psikologi diartikan sebagai salah satu perangkat psikologis yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan mamaknakan sesuatu objek yang ada di lingkungannya. Persepsi adalah representasi fenomenal tentang objek sebagai hasil dari pengorganisasian objek itu sendiri. Dalam persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus mengenai alat indera dengan perantara syaraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses psikologis). Selanjutnya, dalam otak terjadilah sesuatu proses hingga individu itu dapat mengalami persepsi (proses psikologis).

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Sondang, 2004:33). Sedangkan menurut Abizar (2008:18) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang individu memilih, mengevaluasi dan mengorganisir stimulus dari lingkungannya. Persepsi juga menentukan cara kita berperilaku terhadap suatu objek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi perilaku

yang dipilihnya. Jadi persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pada stimulus dalam lingkungan.

Persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

Persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri. Mar'at (2001:34) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian

ditentukan oleh persepsinya. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi dengan menggunakan panca indera, kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu terhadap lingkungan sekelilingnya.

Pengertian persepsi menurut Sondang (2004: 95) adalah interpretasi yang berbeda dari seseorang tentang apa yang dilihat atau dialaminya. Menurut Asrori (2007: 31) persepsi didefinisikan sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali melalui (lingkungan pergaulan) hidupnya.

Proses persepsi terdiri dari tiga tahap, yaitu tahapan pertama terjadi pada penginderaan tahap ke dua diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tahapan ketiga yaitu stimulasi pada penginderaan diinterpretasikan dan dievaluasi. Berdasarkan beberapa pengertian persepsi, penelitian ini mengartikan persepsi bahwa persepsi adalah interpretasi terhadap rangsangan melalui alat indera yang dialaminya setelah diorganisasikan dari lingkungan sekelilingnya.

2.2 Pembentukan Persepsi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Proses pembentukan persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “interpretation”, begitu juga berinteraksi dengan “closure”. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyelesaian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan

interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan member tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari (2004:13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. Bagaimana seseorang melakukan persepsi serta bagaimana suatu rangsangan dipersepsi banyak faktor yang memengaruhinya. Ada beberapa karakteristik yang memengaruhi suatu persepsi seseorang yaitu (1) faktor ciri khas dari obyek stimulus, (2) faktor-faktor pribadi, (3) faktor pengaruh kelompok dan (4) faktor perbedaan latar belakang.

Faktor dari obyek stimulus terdiri dari (1) nilai dari stimulus (2) arti emosional orang yang bersangkutan (3) familiaritas dan (4) intensitas yang berhubungan dengan derajat kesadaran seseorang mengenai stimulus tersebut. Termasuk di dalam faktor pribadi yaitu ciri khas individu seperti taraf kecerdasan, minat, emosional dan sebagainya. Respon orang lain dapat memberi ke arah suatu tingkah laku conform. Studi Flamen (2001:16) menemukan bahwa adanya kohesi dalam kelompok yang berpengaruh dapat menyebabkan perubahan persepsi pada anggota. Perbedaan latar belakang seseorang juga sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang terhadap suatu stimulus. Secara umum ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi yaitu:

1) Faktor-faktor fungsional; faktor-faktor fungsional ini juga disebut sebagai faktor personal atau perseptor, karena merupakan pengaruh-pengaruh di dalam individu yang mengadakan persepsi seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lainnya. Berarti persepsi bersifat selektif secara fungsional sehingga obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Termasuk dalam faktor fungsional ini adalah pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional dan latar belakang sosial budaya. Jadi yang menentukan persepsi bukan

jenis atau bentuk stimulus tetapi karakteristik orang menentukan respon atau stimulus.

2) Faktor-faktor Struktural; faktor struktural merupakan pengaruh yang berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek yang ditimbulkan pada system syaraf individu. Prinsip yang bersifat struktural yaitu apabila kita memersepsikan sesuatu, maka kita akan memersepsikan sebagai suatu keseluruhan. Jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi harus mendorongnya dalam hubungan keseluruhan. Sebagai contoh dalam memahami seseorang kita harus melihat masalah-masalah yang dihadapinya, konteksnya maupun lingkungan sosial budayanya.

Mengorganisasikan sesuatu kita harus melihat konteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi.

Oleh karena manusia selalu memandang stimulus dalam konteksnya, maka manusia akan mencari struktur pada rangkaian stimulus yang diperoleh dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kedekatan atau persamaan, sehingga dari prinsip ini berarti obyek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung dianggap sebagai bagian dari struktur yang sama.

2.3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu obyek dan dinyatakan secara verbal, sedangkan bentuk-bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi, kapan saja, dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya. Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran obyek, tanda

dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Artinya walaupun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya.

Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif. 1) Persepsi positif; yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. 2) Persepsi negatif; yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan dimana subyek yang mempersepsi cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

2.4. Persepsi Siswa

Persepsi seseorang terhadap suatu obyek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berasal dari dalam ataupun dari luar dirinya. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap obyek yang sama. Banyak faktor yang memengaruhi persepsi. Menurut Mar'at persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor : (1) pengalaman, (2) proses belajar, (3) cakrawala dan (4) pengetahuan yang dimiliki. Menurut Bimo Walgito (2002:48) persepsi dipengaruhi oleh : (1) stimulus yang cukup kuat. Stimulus yang kuat dan berulang-ulang akan banyak berpengaruh terhadap persepsi. (2) Fisiologi dan psikologi. Jika sistem fisiologi terganggu hal ini akan berpengaruh dalam persepsi seseorang sedangkan segi psikologis yang mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir dan sebagainya, juga akan berpengaruh bagi seseorang dalam mempersepsi. (3) Lingkungan situasi yang melatarbelakangi stimulus

memengaruhi persepsi. Dalam menentukan persepsi seseorang tidak lepas dari pengaruh kondisi dalam diri orang tersebut, karena kondisi memengaruhi pengaruh besar dalam diri seseorang dalam memersepsi. Bila keadaan atau kondisi orang tersebut baik, maka hasil persepsi atau kemampuan berpikir seseorang dalam memersepsi tersebut itu juga akan baik pula <http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1837978-definisi-persepsi/#ixzz1a5aRvE9o>.

Sedangkan menurut Irwanto (2006:71) faktor-faktor yang memengaruhi persepsi sebagai berikut. (1) Perhatian yang selektif; dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya. Untuk itu, individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu. (2) Ciri-ciri rangsang, biasanya rangsang yang bergerak akan lebih menarik perhatian daripada yang diam. (3) Nilai-nilai dan kebutuhan individu; seorang seniman tentu punya pola dan rasa yang berbeda dalam pengamatan dibanding seorang bukan seniman. (4) Pengalaman terdahulu; pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memersepsi dirinya.

Persepsi merupakan pengalaman seseorang melalui penglihatan untuk mengenali objek dari apa yang dilihat dari lingkungannya. Persepsi ini akan muncul setelah adanya stimulus (rangsangan) dalam diri siswa. Persepsi ini akan berbentuk positif yang diwujudkan dalam bentuk rasa senang atau berbentuk negatif yang ditunjukkan dengan rasa tidak senang.

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

3.1. Hakekat Belajar

Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang melalui penguatan (*reinforcement*), sehingga terjadi perubahan yang bersifat permanen dan

persisten pada dirinya sebagai hasil pengalaman (*Learning is a change of behaviour as a result of experience*), demikian pendapat John Dewey, salah seorang ahli pendidikan Amerika Serikat dari aliran *Behavioural Approach*.

Perubahan yang dihasilkan oleh proses belajar bersifat progresif dan akumulatif, mengarah kepada kesempurnaan, misalnya dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, baik mencakup aspek pengetahuan (*cognitive domain*), aspek afektif (*afektive domain*) maupun aspek psikomotorik (*psychomotoric domain*). Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.

Ada empat pilar belajar yang dikemukakan oleh UNESCO, yaitu :

1. *Learning to Know*, yaitu suatu proses pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai teknik menemukan pengetahuan dan bukan semata-mata hanya memperoleh pengetahuan.
2. *Learning to do* adalah pembelajaran untuk mencapai kemampuan untuk melaksanakan *Controlling, Monitoring, Maintening, Designing, Organizing*. Belajar dengan melakukan sesuatu dalam potensi yang kongkret tidak hanya terbatas pada kemampuan mekanistik, melainkan juga meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain serta mengelola dan mengatasi konflik.
3. *Learning to live together* adalah membekali kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, saling pengertian dan tanpa prasangka.

4. Learning to be adalah keberhasilan pembelajaran yang untuk mencapai tingkatan ini diperlukan dukungan keberhasilan dari pilar pertama, kedua dan ketiga. Tiga pilar tersebut ditujukan bagi lahirnya siswa yang mampu mencari informasi dan menemukan ilmu pengetahuan yang mampu memecahkan masalah, bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleransi terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan menumbuhkan percaya diri pada siswa sehingga menjadi manusia yang mampu mengenal dirinya, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki kematangan emosional dan intelektual, yang dapat mengendalikan dirinya dengan konsisten, yang disebut emotional intelligence (kecerdasan emosi).

3.2. Teori Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan proses bagi manusia untuk menguasai berbagai kompetensi, ketrampilan dan sikap. Proses belajar dimulai sejak manusia masih bayi sampai sepanjang hayatnya. Kapasitas manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Kajian tentang kapasitas manusia untuk belajar, terutama tentang bagaimana proses belajar terjadi pada manusia mempunyai sejarah panjang dan telah menghasilkan beragam teori. Macam-macam teori belajar dan pembelajaran antara lain:

3.2.1. Teori Behavioristik

Premis dasar teori belajar behavioristik menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respons dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respons yang muncul terhadap stimulus yang bervariasi.

Salah satu teori belajar behavioristik adalah teori classical conditioning dari Pavlov yang didasarkan pada reaksi sistem tak terkondisi dalam diri seseorang serta gerak refleks setelah menerima stimulus. Menurut Pavlov, penguatan berperan penting dalam mengkondisikan munculnya respons yang diharapkan. Jika penguatan tidak dimunculkan, dan stimulus hanya ditampilkan sendiri, maka respons terkondisi akan menurun dan/menghilang. Namun, suatu saat respons tersebut dapat muncul lagi.

Sementara itu, connectionism dari Thorndike menyatakan bahwa belajar merupakan proses coba-coba sebagai reaksi terhadap stimulus. Respons yang benar akan semakin diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara respons yang tidak benar akan menghilang. Akibat menyenangkan dari suatu respons akan memperkuat kemungkinan munculnya respons. Respons yang benar diperoleh dari proses yang berulang kali yang dapat terjadi hanya jika siswa dalam keadaan siap.

Teori behaviorism dari Watson menyatakan bahwa stimulus dan respons yang menjadi konsep dasar dalam teori perilaku haruslah berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Interaksi stimulus dan respons merupakan proses pengkondisian yang akan terjadi berulang-ulang untuk mencapai hasil yang cukup kompleks.

3.2.2. Teori Belajar Kognitif

Menurut teori belajar kognitif pada dasarnya setiap orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan pemahamannya atas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki kepercayaan, ide-ide dan prinsip yang dipilih untuk kepentingan dirinya.

Teori kognitif berasal dari teori kognitif dan teori psikologi. Aspek kognitif mempersoalkan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman mengenai dirinya dan lingkungannya dan bagaimana ia berhubungan dengan lingkungan secara sadar.

Sedangkan aspek psikologis membahas masalah hubungan atau interaksi antara orang dan lingkungan psikologisnya secara bersamaan. Psikologi kognitif menekankan pada penting proses internal atau proses-proses mental.

Menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan proses-proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Adapun tujuan teori ini adalah:

- a. Membentuk hubungan yang teruji, teramalkan dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka sendiri secara spesifik sesuai dengan situasi psikologisnya.
- b. Membantu guru untuk memahami orang lain, terutama muridnya, dan membantu dirinya sendiri.
- c. Mengkonstruksi prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan dalam kelas dan menghasilkan prosedur yang memungkinkan belajar menjadi produktif.
- d. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungannya merupakan faktor yang saling berkaitan.

Insight adalah pemahaman dasar yang dapat diaplikasikan pada beberapa situasi yang sama atau hamper sama. Dapat juga dikatakan insight adalah pemahaman terhadap suatu situasi secara mendalam. Insight terjadi dengan melihat kasus-kasus/kejadian yang terpisah, kemudian manggeneralisasikannya sehingga timbul pemahaman.

Perbedaan pandangan teori kognitif dan teori conditioning stimulus-respons adalah sebagai berikut.

- a. Teori kognitif menekankan pada fungsi-fungsi psikologis, sedangkan teori behaviorisme pada segi fisiknya saja.

- b. Teori kognitif berfokus pada situasi saat ini, sedangkan teori behaviorisme pada sejarah masa lalu.
- c. Dalam proses kognitif terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya secara simultan dan saling membutuhkan.

Prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Belajar merupakan peristiwa mental yang berhubungan dengan berpikir, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan kesadaran.
- b. Sehubungan dengan pembelajaran, teori belajar perilaku dan kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus memperhatikan perilaku siswa yang tampak, seperti penyelesaian tugas rumah, hasil tes, disamping itu juga harus memperhatikan faktor manusia dan lingkungan psikologisnya.
- c. Ahli kognitif percaya bahwa kemampuan berpikir setiap orang tidak sama dan tidak tetap dari waktu ke waktu.

Model teori belajar kognitif yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan

adalah model belajar penemuan dari Brunner, model belajar bermakna dari Ausebel, model pemrosesan informasi dan model peristiwa pembelajaran dari Rober Gagne, dan model “perkembangan intelektual” dari Jean Piaget.

3.2.3. Teori Belajar Konstruktivisme

Constructivism merupakan teori dari Piaget. Menurut cara pandang teori ini bahwa belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat.

Konsekuensinya pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Sehingga model pembelajarannya dilakukan secara natural. Penekanan teori ini bukan pada membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada proses untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan.

3.2.4. Teori Belajar Humanistik

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik.

Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya.

Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun, sarana prasarana apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia yaitu mencapai kesempurnaan hidup bagi manusia dengan indikasi (a) kemampuan aktualisasi diri, (b) kualitas pemahaman diri serta (c) kemampuan merealisasikan diri dalam kehidupan yang nyata.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teori humanistic bersifat sangat eklektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu, akan ada kebaikan dan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini eklektisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan unsure-unsur tersebut

dalam keadaan sebagaimana adanya. Teori humanistik akan memanfaatkan teori-teori apapun asal tujuannya tercapai, yaitu memanusiakan manusia.

Jadi teori belajar itu ada bermacam-macam. Diantaranya seperti yang telah dijelaskan diatas. Masing-masing dari teori tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi semua teori tersebut tentunya juga memiliki manfaat bila diterapkan dalam pembelajaran.

Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Konsep tersebut adalah teoretis, dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati:

Anda telah melihat individu mengalami pembelajaran, melihat individu berperilaku dalam cara tertentu sebagai hasil dari pembelajaran, dan beberapa dari Anda (bahkan saya rasa mayoritas dari Anda) telah "belajar" dalam suatu tahap dalam hidup Anda. Dengan perkataan lain, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seorang individu berperilaku, bereaksi, dan merespons sebagai hasil dari pengalaman baru dengan satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya.

a. Definisi Pembelajaran

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian pembelajaran di antara ahli-ahli psikologi pendidikan mengikut mazhab atau fahaman psikologi masing-masing. Berikut adalah definisi definisi pembelajaran mengikut beberapa orang ahli psikologi pendidikan.

Oemar Hamalik, (1995:57) ”Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”.

Gagne dan Briggs (1979:3). Mengartikan; “pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal”.

Darsono Max (2000: 24) Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan pola pikir siswa kearah lebih baik untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

b. Klasifikasi Pembelajaran

Proses pembelajaran melibatkan aspek mental, fisikal, emosi dan sosial. Secara umumnya pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Pembelajaran Formal
- b. Pembelajaran Informal (Tak Formal)
- c. Pembelajaran Non-Formal (Bukan Formal)

c. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Pembelajaran

Pembelajaran dianggap sebagai perolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses

pembelajaran berlaku sepanjang hayat bermula sabaik sahaja dilahirkan. Pembelajaran bukan setakat merangkumi penguasaan pengetahuan kemahiran semata-mata, tetapi perkembangan emosi, sikap, nilai estetika dan kesenian serta ciri dalaman juga dipengaruhi oleh pembelajaran.

Menurut Wina Sanjaya (2008:197) "Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran di antaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang tersedia serta faktor lingkungan".

1. Factor Guru

Guru adalah merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi, maka strategi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan taktik pembelajaran. Diyakini setia guru akan memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang berbeda dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, akan berbeda dengan guru yang menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik. Masing-masing perbedaan tersebut dapat mempengaruhi baik dalam penyusunan strategi atau implementasi pembelajaran.

Guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Peran guru apalagi untuk siswa pada usia pendidikan dasar, tidak mungkin akan dapat digantikan oleh perangkat lain seperti televisi, radio, computer, internet dan sebagainya. Sebab siswa adalah organism yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang lain.

Selanjutnya Wina Sanjaya (2008:198) mengatakan “Dalam proses pembelajaran guru bukan hanya sekedar model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, akan tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (*manager of learning*). Dengan demikian, efektifitas proses pembelajaran terletak dipundak guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru”.

2. Factor siswa

Siswa adalah organisasi yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak sama. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, disamping karakteristik lain yang melekat pada diri anak tersebut.

Factor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakan siswa yang menurut Dunkin disebut *pupil formative experiences* serta factor yang dimiliki siswa atau *pupil properties*.

Sikap dan penampilan siswa di kelas, juga merupakan aspek yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Adakalanya ditemukan siswa yang sangat aktif (*hioperkinetic*) dan ada pula yang sangat pendiam, tidak sedikit pula ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang sangat rendah dalam belajar. Semua itu akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran dikelas. Sebab bagaimanapun siswa dan guru merupakan factor yang sangat menentiukan dalam interaksi belajar dan pembelajaran.

3. Factor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, kantin atau warung sekolah dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Dengan demikian sarana prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran.

Terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana. *Pertama*, kelengkapan sarana dan prasarana akan menumbuhkan gairah dan motivasi guru dalam mengajar. *Kedua* kelengkapan sarana dan prasarana akan dapat memberikan berbagai pilihan siswa dalam belajar dan sekaligus juga dapat meningkatkan motivasi belajar.

4. Factor Lingkungan

Henry E Garret mengemukakan, “Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Di samping itu lingkungan juga difungsikan sebagai sumber pengajaran atau “sumber belajar”.

Dilihat dari dimensi lingkungan dapat kita bagi menjadi dua factor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu factor organisasi kelas dan factor sosio-psikologis. Factor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jumlah anggota kelas yang besar kurang menguntungkan dalam menciptakan iklim belajar yang baik.

Factor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah factor iklim social-psikologis, maksudnya adalah keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim social ini dapat terjadi secara internal atau eksternal.

Iklim social-psikologis secara internal, adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim social anatara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, bahkan guru dengan guru dan guru dengan pimpinan sekolah. Iklim social-psikologis eksternal adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan pihak-pihak diluar sekolah, misalnya sekolah dengan orang tua siswa, hubungan antara sekolah dengan lembaga-lembaga mesyarakat dan lain sebagainya.

3.3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut Somantri (2001: 159), mendefinisikan PKn sebagai berikut :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa PKn merupakan kajian keilmuan yang terdiri

dari beberapa bidang keilmuan sehingga PKn merupakan mata pelajaran yang kaya akan materi dan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan. Selain itu, seiring dengan terus berkembangnya kehidupan sosial maka PKn pun harus terus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, baik dari segi materi ataupun metode pembelajarannya.

Pendapat lain menurut Sapriya & Maftuh Bunyamin (2005: 321), yaitu Mata pelajaran PKn adalah program pendidikan atau mata pelajaran yang memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik, demokratis dan bertanggung jawab. Program PKn ini memandang siswa dalam kedudukannya sebagai warga negara, sehingga program-program, kompetensi atau materi yang diberikan kepada peserta didik diarahkan untuk mempersiapkan mereka mampu hidup secara fungsional sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik. Sedangkan dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Departemen Pendidikan Nasional 2006: 2) ditegaskan bahwa:

“PKn (*citizenships*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PKn memiliki tiga ciri khas, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenships*) untuk membangun keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Adapun isi pengetahuan (*body of knowledge*) dari mata pelajaran PKn

diorganisasikan secara interdisipliner dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, hukum, tata negara, psikologi dan berbagai bahan kajian lainnya yang berasal dari kemasyarakatan, nilai-nilai budi pekerti, dan hak asasi manusia dengan penekanan kepada hubungan antara warga negara dan warga negara, warga negara dan pemerintah, serta warga negara dan warga dunia.

3.3.1. Perkembangan PKn di Indonesia

Di Indonesia ada yang menerjemahkan istilah *civics* dengan Pengetahuan Kewarganegaraan sedangkan *civic education* diterjemahkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah PKn di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Kehadiran program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih muda bila dibandingkan dengan pelajaran *Civics* di Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1790.

Menurut Somantri (2001: 298), sejarah timbulnya *Civics* di Indonesia dapat dilukiskan sebagai berikut

- a. Pada tahun 1957 dalam kurikulum SMP/SMA ada istilah Kewarganegaraan, yaitu pelajaran yang ditempelkan dalam pelajaran tata negara. Isinya hanya membahas tentang cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan
- b. Pada tahun 1961 timbul istilah *Civics* yang kemudian diidentikkan dengan indoktrinasi. Istilah *Civics* sebetulnya jangan dihubungkan dengan kejadian khusus yang mengakibatkan arti *Civics* sehingga menjadi identik dengan indoktrinasi
- c. Pada tahun 1968 *Civics* di sekolah-sekolah diberi nama Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau ditelaah, Pendidikan Kewarganegaraan baik di SD, SLTP maupun di SLTA tidak lain bertujuan untuk mengembangkan dan

menumbuhkan warga negara yang baik

Sedangkan menurut Kuhn (dalam Budimansyah dan Winataputra, 2007: 71) mengemukakan bahwa perkembangan istilah *civics* dan *civic education* di Indonesia terjadi pada tahun:

- a. Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan
- b. Civics (1962) tampil dalam bentuk indoktrinasi politik
- c. Pendidikan Kewarganegaraan (1968) sebagai unsur dari Pendidikan Kewarganegaraan yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial
- d. Pendidikan Kewarganegaraan (1969) tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS
- e. PKn (1973) yang diidentikkan dengan pengajaran IPS
- f. Pendidikan Moral Pancasila (1975 dan 1984) tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4
- g. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) sebagai penggabungan bahan kajian PPKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4

Melihat uraian tersebut dapat dianalisa bahwa di Indonesia istilah PKn mengalami perkembangan dan perubahan, seiring dengan pergantian pemerintah yang menerapkan kebijakan berbeda dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Pada pasc Orde Baru dimana terjadi perubahan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan semakin mendapat tempat yang kokoh dalam Perundang-Undangan Negara RI yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka penamaannya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa PKn wajib dimuat dalam pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Perubahan nama yang terjadi tidak mengurangi esensi PKn sendiri yang pada dasarnya dari setiap perkembangan tersebut fungsi PKn tetap sama yaitu untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenships*). Jika kita menilik isi penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, maka paradigma PKn sekarang lebih menekankan pada semangat nasionalisme, hal ini dilakukan seiring dengan era globalisasi yang telah kita hadapi. Dengan nasionalisme, diharapkan cinta warganegara terhadap bangsanya tidak akan hilang.

3.3.2. Fungsi dan Tujuan PKn

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bidang sosial dan kenegaraan memiliki fungsi yang sangat esensial dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki keterampilan hidup bagi diri, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut Somantri (2001: 166) memberikan pemaparan mengenai fungsi PKn sebagai berikut:

Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam integrasi pribadi dan perilaku sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembelajaran PKn diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar dalam menginternalisasikan moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.

Di dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (Departemen Pendidikan Nasional, 2006: 2) menyatakan bahwa fungsi dari mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut:

“Sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenships*) cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat oleh Pancasila dan UUD 1945”.

Berdasarkan pada fungsi tersebut, maka mata pelajaran PKn harus dinamis dan mampu menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Salah satu cara yang harus ditempuh yaitu guru harus dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman baik pemahaman materi maupun keterampilan intelektual dan partisipatori dalam kegiatan sekolah. Dengan pembelajaran yang bermakna diharapkan siswa dapat mengembangkan serta menerapkan keterampilan intelektual dan partisipatori.

Sapriya & Maftuh Bunyamin (2005: 320) mengemukakan tujuan PKn adalah sebagai berikut:

“Secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenships*) yakni, warga yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka tujuan PKn di Indonesia bukan saja untuk meningkatkan pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga mengacu kepada tujuan-tujuan yang mengandung perilaku dan karena itu penting untuk pengembangan

motivasi belajar siswa secara efektif, dimana nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dipraktekkan dalam aspek kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Dalam kehidupan kewarganegaraan, siswa harus memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut (Dasim & Udin, 2007: 99)

- a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pembinaan warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter serta bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Melalui pengetahuan yang diberikan di sekolah-sekolah kepada peserta didik diharapkan akan lahir generasi muda yang berpikir secara kritis, rasional dan kreatif, memiliki sikap demokratis dan tanggung jawab sebagai warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.3.3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu Negara, ilmu tata Negara, hukum sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan

dasar negara dengan konstitusi

- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
- g. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

3.3.4. Kompetensi Yang Diharapkan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). Generasi penerus melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para

mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Berkaitan dengan pengembangan nilai, sikap, dan kepribadian perlu pembekalan kepada peserta didik di Indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar (sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan) yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa .

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari-hari.

Rakyat Indonesia, melalui MPR menyatakan bahwa : Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk “meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa “.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, Terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Undang–Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Kompetensi yang diharapkan bagi peserta didik setelah lulus Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu “memahami, menganalisa, dan menjawab masalah–masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita–cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 “.

Perjuangan non fisik, harus tetap memegang teguh nilai–nilai ini disemua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme; menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing; memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan berpikir obyektif rasional serta mandiri.

3.3.5. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Dalam Ilmu Pendidikan Sosial

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship tranmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya.

Konsep-konsep Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang termuat di dalam lima tradisi *social studies* yaitu sebagai berikut :

1. IPS sbagai Tranmisi Kewarganegaraan (*social studies as citizenship transmission*)

2. IPS sebagai Ilmu-Ilmu Sosial (*social studies as social sciences*),
3. IPS sebagai Penelitian Mendalam (*social studies as reflektive inquiry*),
4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai Kritik Kehidupan Sosial (*social studies as social criticism*) dan
5. IPS sebagai Pengembangan Pribadi Individu (*social studies as personal development of the individual*).

Ada sepuluh Tema pada pendidikan IPS, PKn merupakan salah satu dari sepuluh tema IPS. Sepuluh tema pendidikan IPS, sub tema yang ke sepuluh merupakan subtema Pendidikan kewarganegaraan. Sepuluh tema IPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Culture*
2. *Time, continuity and change*
3. *People, places, and environment*
4. *Individual development and identity*
5. *Individual, groups and institutions*
6. *Power, authority and governance*
7. *Production, distribution, and consumption*
8. *Science, technology and society*
9. *Global connections, and*
10. *Civic ideals and practices*

Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai: "Suatu bidang kajian yang memusatkan telahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatannya

terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional” (Wiranaputra, 2007: 89).

Salah satu masalah yang terkait dengan penerapan esensi pendidikan ilmu pengetahuan sosial contohnya mata pelajaran kewarganegaraan adalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dan munculnya arogansi kesukuan dan golongan yang merusak sendi-sendi demokratisasi.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam memperjuangkan jati diri bangsa Indonesia dalam persaingan global dan memudarnya integrasi nasional, maka diperlukan sosialisasi hasil kajian esensi pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi bagaimana pembelajarannya agar mampu memperkuat revitalisasi nasionalisme Indonesia menuju *character and nation building* sebagai tumpuan harapan pendidikan masa depan. Juga dapat memperkuat kembali komitmen kebangsaan yang selama ini mulai memudar dengan tekad memperjuangkan bangsa Indonesia yang berkualitas dan bermartabat. Dengan demikian maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan moral bangsa adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar untuk tetap eksis dan maju ke arah paradigma baru yang terkenal dengan arah baru atau paradigma moderat.

5. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)

Uraian di atas menegaskan bahwa materi PKn dapat diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kualifikasi untuk dijadikan bahan ajar yang tidak menyimpang dari kurikulum yang telah ditentukan. Ruang lingkup materi PKn sekarang ini, selain mempelajari masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, juga mengkaji masalah dalam kehidupan nyata. Tentu saja kondisi tersebut menuntut para guru untuk bisa memanfaatkan masalah-masalah yang sedang terjadi di

lingkungan masyarakat sebagai bahan ajar yang harus disampaikan kepada siswa.

Menurut Depdiknas (2006: 2) aspek-aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

a. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)

Menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. *Center for Civic Education* (CEE) maupun *Standardt and Civics Framwork for the 1998 National Assesment of Education* (NAEP) mengajukan 5 pertanyaan yang jawabannya akan mengarah pada substansi pengetahuan kewarganegaraan dan standar isi (*content standard*) yang berupa ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter

kewarganegaraan (*civic dispotisions*). Kelima pertanyaan tersebut yaitu :

- a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan ?
- b. Apa fondasi – fondasi sistem politik ?
- c. Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai – nilai dan prinsip – prinsip demokrasi ?
- d. Bagaimana hubungan negara dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah – masalah internasional ?
- e. Apa peran warga negara dalam demokrasi ?

Tentang substansi pengetahuan kewarganegaraan ada beberapa pandangan yakni menurut CICED/*Center for Indonesian Civic Education* (2000 : 43), Menurut Pusat Pengujian Balitbang Diknas yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta, yang juga dikembangkan dalam ToT (*Training of Trainers*) Guru SLTP/MTs mata pelajaran PPKn Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas, dan Puskur (Pusat Kurikulum) atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), mengajukan substansi pengetahuan kewarganegaraan seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Pengetahuan Kewarganegaraan

CICED	PUSIJIBANG	PUSKUR/KBK
1. principles of democracy	1. Manusia sebagai zoon, politicon	1. Persatuan Bangsa,
2. comprehend of state constitution	2. Norma, Hukum, dan moral, Peraturan,	2. Nilai, norma dan
3. citizen's rights anf responsibility	3. Norma-norma dalam masyarakat,	3. Hak Asasi Manusia (HAM)
4. state's rule of law	4. Bangsa dan Negara,	4. Kebutuhan Hidup,
5. good government	5. Konstitusi,	5. Kekuasaan dan Politik,
6. citizenship	6. Lembaga-Lembaga Politik,	6. Masyarakat Demokratis,
7. people sovereignty	7. Kewarganegaraan,	7. Pancasila & Konstitusi Negara
8. free and fair tribune	8. Sistem Politik Demokrasi,	8. Globalisasi.
9. equality and equity	9. Negara Hk & Penegakkannya	
10. justice	10. Hak Asasi Manusia(HAM)	

11. human rights	11. Peran Indonesia dalam H I
12. civilization	12. Identitas Nasional.
13. cultural differences	
14. democratic processes	
15. citizenship activities	
16. national identity/attributes	
17. civil society	
18. free market economy	
19. political processes	

Tabel 2.2. Sebaran Materi Pokok Kewarganegaraan SLTP/ MTs dalam Mata Pelajaran Kewarganegaraan Kurikulum 2004

20. distribution Of power		
Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
1. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah	1. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik	1. Pembelaan terhadap negara
2. Perundang-undangan Nasional	2. Budaya Demokrasi	2. Hukum dan Peradilan Nasional
3. Pancasila sebagai Ideologi Nasional	3. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia	3. Instrumen Internasional
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat	4. Konflik antar Bangsa dan Lembaga Internasional	4. Perlindungan Hukum
5. Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi		5. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Tabel 2.3. Sebaran Materi Pokok Kewarganegaraan SMA/MA dalam Kurikulum 2004

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1. Hakikat Bangsa dan Negara	1. Prestasi Diri	1. Sistem Pemerintahan
2. Nilai, Macam-macam Norma dan Sanksinya	2. Keterbukaan dan Jaminan Keadilan	2. Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat
3. Penegakkan Hak Asas Manusia dan Implikasinya	3. Sistem Politik	3. Globalisasi
4. Masyarakat Politik	4. Hubungan Internasional	
5. Prinsip-prinsip Demokrasi	5. Sistem Hukum Internasional Dan Pengadilan Internasional	
6. Hubungan dasar Negara dengan NKRI	6. Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945	

Dengan memperhatikan aspek – aspek civic knowledge seperti dikemukakan dari berbagai pandangan di atas, maka dapat dinyatakan aspek – aspek tersebut pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam

hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.

b. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*)

Meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

c. Watak kepribadian kewarganegaraan (*civic disposition*)

Watak kepribadian kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik, misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial dan lain-lain.

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan yang dimaksud menyangkut lingkungan sosial dan lingkungan alam hidup. Contoh lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara/dunia internasional. Sedangkan contoh alam hidup berupa flora dan fauna dengan kekhasannya berdasarkan iklim dan daerah setempat atau lingkungan alam berupa bentuk-bentuk muka bumi (dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, danau, laut, dan sebagainya).

Lingkungan sosial dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah ini terkait dengan beberapa standar kompetensi diantaranya memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Dalam proses pembelajaran untuk kompetensi dasar ini siswa diajak secara langsung mendatangi kantor kepala desa atau kantor kecamatan. Kemudian siswa diminta untuk mengamati tentang system pemerintahan yang ada di tingkat desa atau kecamatan, misalnya tentang struktur organisasinya. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya memiliki bayangan, seperti yang didapatkan dari buku atau guru, tetapi secara langsung siswa mendapatkan pengalaman dari lingkungan sosial tentang apa yang mereka pelajari.

Lingkungan memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap kepribadian seseorang. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang seperti pengaruh udara terhadap manusia yang tidak bisa hidup tanpanya, bahkan mungkin lebih. Anak yang dididik dengan budaya kekerasan kelak dewasa ia akan jadi sosok yang berbeda dengan anak yang dididik dengan pendekatan kelembutan dan kemanusiaan .

Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan social (lingkungan pendidikan) merupakan aspek yang amat penting karena dapat membentuk kepribadian dan

karakter anak meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah lingkungan masyarakat, yang disebut tripusat pendidikan.

5.1. Lingkungan Keluarga

Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat hubungan timbal balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2003:2) menyatakan “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Pengertian belajar di atas menekankan bahwa belajar merupakan suatu pengalaman dan pengalaman itu salah satunya diperoleh berkat adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Lingkungan sebagai sumber belajar menurut Depdikbud (1990:70) menyatakan “lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial”. Contoh lingkungan fisik yang dapat digunakan sebagai sumber belajar adalah buku, museum, toko, pasar, jalan, sungai sedangkan yang termasuk dalam contoh lingkungan sosial adalah keluarga dan masyarakat. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar sebagai sumber belajar meliputi aspek manusia dan non manusia. Menurut para ahli psikologi, lingkungan yang banyak memberikan sumbangan dan besar pengaruhnya terhadap proses belajar maupun perkembangan anak adalah lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan primer yang kuat pengaruhnya kepada individu dibandingkan dengan lingkungan sekunder yang ikatannya agak longgar. Selain itu keluarga juga

merupakan lingkungan pendidikan pertama pra sekolah yang dikenal anak pertama kali dalam pertumbuhandan perkembangannya. Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama sebelum lingkungan sekolah dan masyarakat, Ngalm Purwanto (2004:141) menyatakan “lingkungan pendidikan yang ada dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Lingkungan Keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama.
2. Lingkungan Sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua.
3. Lingkungan Masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga”

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa anak menerima pendidikan pertama kali dalam lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan kata lain tanggung jawab pendidikan anak terletak pada kerjasama antara keluarga, sekolah dan masyarakat.

Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam menuntun perkembangan anak untuk menjadi manusia dewasa. Untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang sumbangan dan peranan keluarga dalam mempengaruhi proses belajar dan perkembangan anak, maka perlu dikaji pengertian lingkungan keluarga. Pengertian lingkungan keluarga berasal dari kata lingkungan dan keluarga. Imam Supardi (2003:2) menyatakan “lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati”.

Menurut Abu Ahmadi (1991:167) menyebutkan “keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak yang mempunyai hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinaan dan atau adopsi”. Jadi, lingkungan keluarga adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam kelompok sosial kecil tersebut, yang terdiri atas

ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial karena adanya ikatan darah, perkawinan dan atau adopsi.

Anak akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: Cara orang tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut apabila dapat menjalankan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing dengan baik, kemungkinan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi sikap dan karakter anak.

Lingkungan sosial yang pertama yang dikenal individu sejak lahir adalah keluarga. Ibu, ayah dan anggota keluarga lainnya merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu. Sosialisasi yang dialami individu secara intensif berlangsung dalam keluarga. Pengenalan nilai, norma dan kebiasaan untuk pertama kali diterima dari keluarga. Pengaruh sosialisasi dan enkulturasi yang berasal dari keluarga sangat besar bagi pembentukan dan perkembangan individu. Kebiasaan baik yang positif maupun yang berlangsung lama dan terbuka dalam lingkungan keluarga dapat tertanam secara kuat pada kepribadian seseorang. Kebiasaan tidur dan bangun cepat atau terlambat, kebiasaan menggosok gigi, kebiasaan menyisir rambut dan berpakaian rapi atau tidak, yang terbawa dalam kepribadian seseorang, berlangsung dalam keluarga.

Pada masa lampau pelajaran agama pun dilakukan dalam lingkungan ini. Selanjutnya keadaan keluarga sebagai suatu bentuk lingkungan sosial termasuk besar kecilnya keluarga, keharmonisan keluarga, perlakuan ayah ibu terhadap seorang anak, sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian seorang anak.

Dalam menanamkan disiplin, nilai, norma, kebiasaan dasar, keluarga sangat besar perannya. Fungsi keluarga sebagai sarana pewarisan budaya dapat berkurang

apabila hubungan orang tua dengan anak tidak lagi mendalam karena berbagai tuntutan dan kebutuhan hidup. Peranan keluarga dalam pembinaan kepribadian anak menjadi sangat mundur. Tugas keluarga memberikan dasar pendidikan dan kebiasaan menjadi sangat dangkal. Akibatnya perkembangan kepribadian anak menjadi lebih terpengaruh oleh hal-hal yang negative. Dewasa ini penanaman kebiasaan yang baik, penanaman nilai, dan norma, penanaman disiplin dan lain-lainnya melalui orang tua menjadi sangat lemah. Bahkan pada beberapa keluarga terdapat kecenderungan merosotnya wibawa orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan sendirinya peranan orang tua sebagai sarana pewarisan budaya akan menurun. Hal itu antara lain juga disebabkan antara lain oleh kesibukan orang tua di luar rumah sehingga hubungan dengan anak menjadi kurang mendalam.

Selain itu motivasi juga bisa diberikan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotifasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab.

5.2. Lingkungan Sekolah

Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu dikirimkan anak ke sekolah.

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut;

- a. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik.
- b. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah.
- c. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan.
- d. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik (atau "murid") di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa atau peserta didik kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara (dibahas pada bagian Daerah di bawah), tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Selain sekolah-sekolah inti, siswa di negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah beberapa anak-anak yang sangat muda (biasanya umur 3-5 tahun). Universitas, sekolah kejuruan, perguruan tinggi atau seminari mungkin tersedia setelah sekolah menengah. Sebuah sekolah mungkin juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif sekolah dapat menyediakan kurikulum dan metode non tradisional.

Ada juga sekolah non pemerintah, yang disebut sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka; keagamaan, seperti sekolah Islam, sekolah Kristen, dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan dan pendidikan dan pelatihan militer.

Dalam *homeschooling* dan sekolah *online*, pengajaran dan pembelajaran berlangsung di luar gedung sekolah tradisional. Pembelajaran ini berlangsung di rumah, atau dimanapun yang memungkinkan terjadinya proses belajar belajar. System pembelajaran online adalah system pembelajaran modern dengan melibatkan teknologi.

Menurut Sartain (ahli psikologi Amerika), yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes*.

Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik, sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial.

Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses lingkungan pendidikan (pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dll) dinamakan sumber belajar. Secara umum lingkungan pendidikan mempunyai fungsi membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia,

agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dengan demikian lingkungan sekolah dapat membentuk dan mewarnai karakter anak peserta didik.

5.3. Lingkungan Masyarakat

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan diluar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas.

Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian (pengetahuan), sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.

Pengertian lingkungan masyarakat ada dua istilah yang sangat erat kaitannya tetapi berbeda secara gradual ialah “alam sekitar” dan “lingkungan”. Alam sekitar mencakup segala hal yang ada di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat letaknya, baik dari masa silam maupun yang akan datang tidak terikat pada dimensi waktu dan tempat. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan/atau pengaruh tertentu kepada individu.

Lingkungan ini mengitari sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dengan manusia ada pengaruh yang timbal balik. Artinya lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Henry E Garret mengemukakan, “Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Di samping itu lingkungan juga difungsikan sebagai sumber pengajaran atau “sumber belajar”.

Sertain (seorang ahli psikologi Amerika) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan (*environment*) ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes* kita, kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (*to provide environment*) bagi gen-gen yang lain.

Sedangkan istilah masyarakat dalam istilah bahasa Inggris disebut *society*, dalam bahasa Arab disebut musyarakah artinya bersama-sama kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Istilah sosiologinya di sebut berinteraksi.

Masyarakat suatu sistem sosial atau kesatuan hidup yang mempunyai banyak faktor dalam pembentukannya, sehingga banyak definisi masyarakat yang dikemukakan oleh Hartono sebagai berikut:

1. Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama , sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
2. M.J. Haeskovitas menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu.
3. Gilin mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

4. S.R. Steimentz memberikan batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.
5. Lebih terperinci dikemukakan oleh Mac Iver, bahwa masyarakat adalah satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. System yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dideskripsikan ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

1. Manusia hidup bersama
2. Bergaul dalam jangka waktu yang lama
3. Setiap anggotanya menyadari dirinya sebagai satu kesatuan
4. Bersama-sama membangun suatu kebudayaan yang menjadi pedoman dalam hidup bersama.

Sedangkan menurut Prof. Robert W. Richey memberikan batasan tentang masyarakat adalah sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang (relatif) sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan.

B. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang masalah nasionalisme di beberapa perguruan tinggi. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai macam fokus yang ingin dianalisis, baik mengenai peranannya, hubungannya, dan urgensi antara sikap nasionalisme dan faktor-faktor yang berkorelasi dengan hal

tersebut. Dari beberapa penelitian tentang sikap nasionalisme dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Dra. Sundari, M.Pd, pada tahun 2009 yang berjudul:
 "Hubungan Antara Faktor Guru, Lingkungan, dan Siswa dengan Sikap Nasionalisme di Kalangan Pelajar SMA" (Suatu Studi tentang Peran Pembelajaran PKn untuk Menumbuhkan Sikap Nasionalisme). Dalam disertasinya yang menyoroti pembelajara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), telah membuktikan bahwa sikap nasionalisme dikalangan pelajar SMA saat ini mulai menurun. Hal itu tergambar dari hasil penelitiannya terhadap sampel 1.044 orang siswa SMA, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Metode yang diterapkan yaitu metode kuantitatif dan desain penelitian survei. Hasil dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa sikap nasionalisme di kalangan pelajar SMA, memang menurun. Hal itu sangat dipengaruhi oleh empat faktor yang berkorelasi terhadap para siswa, yakni faktor kompetensi guru, faktor lingkungan sekolah, faktor kemampuan siswa, dan faktor demografis siswa.

2. Skripsi berikutnya berjudul Peranan Pembelajaran Pkn terhadap perkembangan perilaku nasionalisme siswan Skripsi ini ditulis oleh Maulana Yusup S tahun 2007 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan peranan pembelajaran Pkn terhadap perilaku nasionalisme siswa. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pkn merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan perilaku nasionalisme

3. Skripsi yang ditulis oleh Deleny Yumarlia pada tahun 2005 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) yang berjudul "Peranan guru PKn

dalam mengembangkan sikap nasionalisme siswa.” Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini memaparkan tentang gambaran bagaimana peranan guru Pkn dalam upaya mengembangkan sikap nasionalisme siswa. Adapun hasil penelitian ini bahwa guru Pkn sudah memiliki kesiapan dan kemampuan profesional yang baik dalam mengembangkan sikap nasionalisme dilihat dari kemampuan menyampaikan materi, kemampuan membimbing dan membina siswa kearah pengembangan sikap nasionalisme.

4. Skripsi dengan judul “Kinerja Guru Pkn dalam meningkatkan nasionalisme” yang ditulis oleh Adik Nur K tahun 2009 Universitas Pendidikan Indonesia. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menggambarkan kinerja guru Pkn dalam meningkatkan nasionalisme siswa.
5. Litbang Kompas (1998), dengan judul Indonesia dalam krisis kebangsaan melakukan jajak pendapat terhadap sejumlah responden mengenai semangat kebangsaan. Hasil temuan survei menunjukkan sebanyak 60% responden merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, 24,3% merasa bangga, 31% tidak tahu, dan 12,6% biasa saja.
6. Eka Eryanto (2011), penelitian tentang Pengaruh materi Pkn tentang nasionalisme dan lingkungan sosial serta kontribusinya bagi pengembangan sikap nasionalisme siswa. (Studi Deskriptif pada SMA Negeri di Kota Bandung). Pembelajaran PKn tentang nasionalisme mendidik siswa memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, serta belajar mengaplikasikan pengetahuan terbaiknya. Dengan pembelajaran PKn tentang nasionalisme merangsang pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar dan keterlibatan siswa terhadap masalah yang baru dan kompleks. Penyusunan tesis ini, permasalahan yang dibahas antara lain, pertama, seberapa besar

tingkat pemahaman siswa terhadap materi PKn tentang nasionalisme. Kedua, seberapa besar pengaruh materi PKn terhadap pengembangan sikap nasionalisme siswa. Serta yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sikap Nasionalisme siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis pada SMA Negeri di kota Bandung. Adapun responden yang diambil sebagai sampel data dalam penelitian ini yaitu siswa SMAN 8 Bandung sebanyak 40 orang, serta siswa SMAN 13 Bandung sebanyak 40 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa, serta skala sikap untuk mengukur hasil belajar afektif siswa. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan mengenai pemahaman siswa terhadap materi PKn tentang Nasionalisme, pada Pengaruh materi PKn tentang Nasionalisme terhadap pengembangan sikap Nasionalisme siswa, pada faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sikap nasionalisme siswa, pada Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan mengenai pemahaman siswa terhadap materi PKn tentang nasionalisme, pengaruh materi PKn tentang Nasionalismeterhadap pengembangan sikap nasionalisme siswa, serta faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sikap nasionalisme siswa. Dengan demikian, pembelajaran PKn tentang nasionalisme dan lingkungan sosial mendidik siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa, serta memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini.

Dari beberapa penelitian di atas, ada yang memiliki persamaan judul maupun pembahasan yang akan dibahas dalam tesis yang akan peneliti tulis. Namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui seperti apa sikap

bangga (nasionalisme) sebagai bangsa Indonesia peserta didik yang tertanam dalam diri siswa melalui peran pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan, *civic Knowledge* dan lingkungan social. Serta upaya dan hal apa saja yang dapat dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dalam mengembangkan sikap bangga (nasionalisme) sebagai bangsa Indonesia peserta didik saat ini, yang mulai memudar karena berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai masalah nasionalisme, peneliti merasa masih perlu melakukan kajian penelitian mengenai sikap nasionalisme siswa di sekolah melalui upaya yang dilakukan guru Pendidikan kewarganegaraan (PKn) khususnya dalam membina, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk menjadi warganegara yang baik, memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi.

Pengembangan dan pembentukan sikap atau kepribadian siswa merupakan hal yang harus mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam lingkungan pendidikan formal maupun non formal dalam menghadapi perkembangan jaman dan arus globalisasi yang juga memberikan dampak negatif bagi kelangsungan generasi muda sebagai penerus bangsa.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir secara umum dapat diartikan suatu gambaran tentang alur atau jalan pikiran si peneliti dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas atau independen (X) dan variabel terikat atau dependen (Y). Sebagai variabel bebasnya (independen) adalah Persepsi siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X_1), dan lingkungan sosial (X_2) *civic knowlege* (X_3). Sebagai variabel terikatnya (dependen) adalah sikap nasionalisme siswa (Y).

1. Pengaruh Persepsi siswa Tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X₁) Terhadap sikap nasionalisme siswa (Y)

Pembelajaran PKn adalah merupakan pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warganegara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warganegara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara .

Dengan pembelajaran diharapkan akan membawa perubahan pada diri seseorang, ada perubahan ke arah kebaikan ataupun keburukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang diakibatkan karena belajar. Bukan perubahan karena akibat makan, kelaparan, perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan, dan penyakit tidak dianggap sebagai pembelajaran.

Tujuan pembelajaran diantaranya adalah mengembangkan persepsi, kemudian mewujudkannya menjadi kemampuan-kemampuan yang tercermin dalam cara berfikir (kognitif), bekerja motorik, serta bersikap. Hal ini berarti pengembangan persepsi akan menyebabkan meningkatkan kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan bekerja. Hal ini penting dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan kemampuan cara berpikir, bekerja, dan bersikap yang baik membuat siswa akan tahu bagaimana cara memahami sesuatu termasuk mata pelajaran yang dihadapi oleh siswa dan pada akhirnya menimbulkan dampak pada kebiasaan dan perilaku siswa.

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar siswa dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku sehari-hari. Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, trampil, memiliki semangat nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, siswa dituntut untuk memiliki jiwa dan semangat nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang baik di lingkungannya.

Nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga, kecintaan alamiah terhadap tanah air, mengakui adanya dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, perasaan membela tanah air apabila dalam keadaan terancam, selalu berhubungan baik dan punya rasa toleransi, memiliki rasa perduli, tepa selira, setia kawan, dan cinta damai, peka dan perduli terhadap lingkungan, perduli terhadap masalah sosial, masalah kenegaraan baik nasional maupun internasional.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka persepsi siswa tentang pembelajaran Persepsi siswa tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan jiwa dan semangat rasa nasionalisme serta sikap bangga sebagai bangsa Indonesia pada diri peserta didik. Sehingga pengajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting setrategis di dalam menanamkan nilai-nilai karakter, sikap cinta tanah air, jiwa patriotisme dan sikap nasionalisme kepada siswa.

2. Pengaruh Lingkungan Sosial (X₂) Terhadap sikap nasionalisme siswa(Y)

Lingkungan sosial yang dimaksud menyangkut lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara/dunia internasional. Lingkungan sosial dalam pembelajaran PKn di Sekolah ini terkait dengan beberapa standar kompetensi diantaranya memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Dalam proses pembelajaran untuk kompetensi dasar ini siswa diajak secara

langsung mendatangi kantor kepala desa atau kantor kecamatan. Kemudian siswa diminta untuk mengamati tentang system pemerintahan yang ada di tingkat desa atau kecamatan, misalnya tentang struktur organisasinya. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya memiliki bayangan, seperti yang didapatkan dari buku atau guru, tetapi secara langsung siswa mendapatkan pengalaman dari lingkungan sosial tentang apa yang mereka pelajari. Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan social (lingkungan pendidikan) merupakan aspek yang amat penting karena dapat membentuk kepribadian dan karakter anak meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan lingkungan masyarakat, yang disebut tripusat pendidikan.

Lingkungan memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap kepribadian seseorang. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang seperti pengaruh udara terhadap manusia yang tidak bisa hidup tanpanya, bahkan mungkin lebih. Anak yang dididik dengan budaya kekerasan kelak dewasa ia akan jadi sosok yang berbeda dengan anak yang dididik dengan pendekatan kelembutan dan kemanusiaan .

Dari paparan di atas jelas sekali bahwa lingkungan social benar-benar memberikan warna yang kuat terhadap pembentukan karakter, semangat kebangsaan, cinta tanah air, rasa nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu maka lingkungan social tidak boleh diabaikan dan harus selalu didorong untuk dibina sehingga bisa menjadi lingkungan yang baik bagi perkembangan karakter dan sikap nasionalisme.

3. Pengaruh pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) (X_3) Terhadap sikap nasionalisme siswa (Y)

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus

diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

Center for Civic Education (CCE) maupun *Standardt and Civics Framework for the 1998 National Assesment of Education (NAEP)* mengajukan 5 pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan ?
2. Apa fondasi – fondasi sistem politik ?
3. Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai – nilai dan prinsip – prinsip demokrasi ?
4. Bagaimana hubungan negara dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah –masalah internasional ?
5. Apa peran warga negara dalam demokrasi ?

Dari kelima pertanyaan tersebut jawabannya akan mengarah pada substansi pengetahuan kewarganegaraan dan standar isi (*content standard*) yang berupa ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispotisions*).

Dengan demikian peran pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) mempunyai andil yang besar dalam pembentukan jiwa dan semangat rasa nasionalisme serta sikap bangga sebagai bangsa Indonesia pada diri peserta didik.

4. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Pembelajaran PKn (X_1), Lingkungan Sosial (X_2) dan Pengetahuan Kewarganegaraan *Civic Knowledge* (X_3) Terhadap sikap nasionalisme (Y)

Persepsi siswa tentang Pembelajaran PKn merupakan hal yang penting karena PKn merupakan pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warganegara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warganegara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara .

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

Lingkungan sosial yang dimaksud menyangkut lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Lingkungan sosial dalam pembelajaran PKn di Sekolah ini terkait dengan beberapa standar kompetensi diantaranya memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Dalam proses pembelajaran untuk kompetensi dasar ini siswa diajak secara langsung mendatangi kantor kepala desa atau kantor kecamatan. Kemudian siswa diminta untuk mengamati tentang system pemerintahan yang ada di tingkat desa atau kecamatan, misalnya tentang struktur organisasinya. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya memiliki bayangan,

seperti yang didapatkan dari buku atau guru, tetapi secara langsung siswa mendapatkan pengalaman dari lingkungan sosial tentang apa yang mereka pelajari.

Lingkungan memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap kepribadian seseorang. Lingkungan social benar-benar memberikan warna yang kuat terhadap pembentukan karakter, semangat kebangsaan, cinta tanah air, rasa nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia.

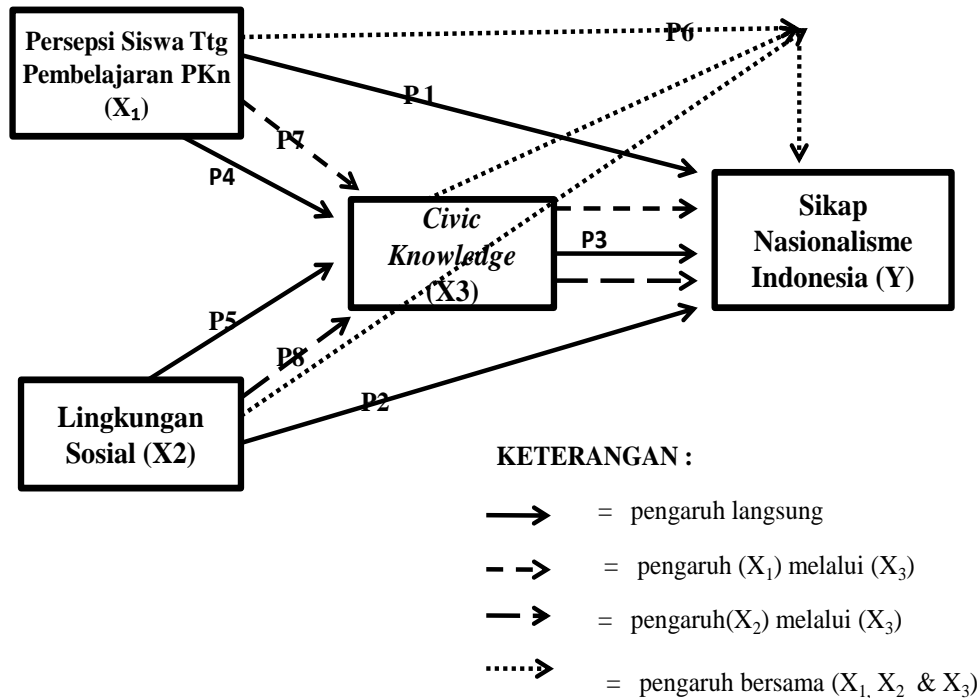
Sikap dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan individu untuk bertindak terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh faktor kognisi dan afeksi individu terhadap objek tersebut. Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensi untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila dihadapkan suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.

Secara umum sikap nasionalisme atau sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial.

Baik buruknya sikap nasionalisme atau sikap bangga sebagai Bangsa Indonesia siswa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah dari pembelajaran PKn, pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan lingkungan sosial. Pembelajaran PKn akan membawa perubahan tingkat pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) pada individu yaitu dengan diperolehnya kemampuan dan kecakapan baru.

Dengan demikian Persepsi Siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan Lingkungan sosial,

akan sangat berpengaruh pada sikap nasionalisme atau sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Bahkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*).



Gambar 1.1. : Paradikma Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis adalah pemecahan sementara atas masalah penelitian (Dalen dalam Ibnu Hajar, (1999 : 61)

Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka pikir maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Persepsi Siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh langsung terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.

2. Lingkungan sosial berpengaruh langsung terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
3. *Civic Knowledge* berpengaruh langsung terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
4. Persepsi Siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, berpengaruh langsung terhadap *civic knowledge* siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
5. Lingkungan social berpengaruh terhadap Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
6. Persepsi Siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, lingkungan social dan *civic knowledge* siswa berpengaruh terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
7. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, melalui *civic knowledge* siswa berpengaruh terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
8. Lingkungan social melalui Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa berpengaruh terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.